

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Penelitian dilakukan pada 26 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Untuk menguji bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, serta pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I.

4.1.1 Gambaran Obyek Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota antara lain:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Provinsi Jawa Barat beribukota di Kota Bandung, merupakan provinsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari 27 kabupaten/kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, Sedangkan jumlah kecamatan 626, daerah perkotaan 2.671 dan 3.291 perdesaan. Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5° 50'-7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48'-108° 48' Bujur Timur. Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbanyak, yakni 45.340.800 Jiwa serta memiliki potensi pariwisata dan budaya yang sangat kaya. Kontribusi Jawa Barat terhadap secara ekonomi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : jabarprov.go.id

Gambar 4.1

A. Visi dari Provinsi Jawa Barat yaitu :

“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA BUAT SEMUA”

B. Misi Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kerja pemerintahan, profesionalisme, aparatur, dan perluasan partisipasi publik;

4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni, dan budaya, peran pemuda, dan olahraga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Untuk melakukan analisis regresi linier mengenai pengaruh antara variabel independen dan dependen, terlebih dahulu dideskripsikan masing-masing variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan analisis regresi linier multipel dan analisis linier sederhana, dimana analisis linier multipel dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap variabel intervening yaitu Belanja Modal. Selanjutnya analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Data variabel ini diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta data PDRB Kabupaten/kota di Jawa Barat yang dipublikasikan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

4.1.2.1 Gambaran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun hampir semuanya terjadi peningkatan. Data mengenai Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut untuk diteliti selama periode pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2008-2012 (Ribuan Rp)

No	Nama Instansi Pemerintahan	NILAI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kabupaten Bogor	311.981.538	337.903.884	399.263.957	685.121.399	1.068.548.454
2	Kabupaten Sukabumi	87.402.425	80.616.079	98.439.617	151.825.718	185.190.546
3	Kabupaten Cianjur	77.905.506	93.628.876	114.305.536	154.209.665	215.802.560
4	Kabupaten Bandung	144.138.083	152.549.656	198.650.518	291.079.862	366.316.390
5	Kabupaten Garut	83.306.425	102.702.673	108.914.764	122.418.643	184.269.765
6	Kabupaten Tasikmalaya	48.978.171	49.657.867	48.321.760	55.771.204	60.970.811
7	Kabupaten Ciamis	46.847.498	51.276.556	50.512.876	58.467.315	87.711.885
8	Kabupaten Kuningan	42.825.180	63.573.539	68.158.690	82.917.043	97.605.696
9	Kabupaten Cirebon	101.512.670	116.095.438	139.426.725	193.843.222	229.992.688
10	Kabupaten Majalengka	45.670.008	68.121.599	76.398.018	86.579.536	103.740.972
11	Kabupaten Sumedang	87.633.522	90.819.326	108.646.804	139.823.278	161.995.577
12	Kabupaten Indramayu	56.770.811	86.408.587	99.439.223	144.553.804	164.671.615
13	Kabupaten Subang	28.520.934	67.665.305	130.968.161	94.181.847	120.972.035
14	Kabupaten Purwakarta	59.429.025	64.004.768	76.489.287	111.271.086	151.567.978
15	Kabupaten Karawang	131.785.039	130.020.658	186.949.235	378.630.052	658.597.371
16	Kabupaten Bekasi	249.063.087	287.299.507	258.671.098	599.070.131	801.852.906
17	Kabupaten Bandung Barat	30.466.721	39.964.364	50.268.420	94.606.169	136.291.257
18	Kota Bogor	97.767.320	125.313.316	134.739.596	230.449.645	252.280.722
19	Kota Sukabumi	65.263.021	66.190.681	91.472.357	115.351.808	148.387.666
20	Kota Bandung	314.627.155	360.152.627	441.871.142	834.505.865	1.005.583.425
21	Kota Cirebon	67.683.578	77.318.390	90.795.675	120.130.531	149.489.858
22	Kota Bekasi	189.492.859	231.694.925	296.046.879	568.344.299	730.735.134
23	Kota Depok	112.763.186	115.720.348	142.380.789	282.747.545	474.705.361
24	Kota Cimahi	64.964.961	75.037.372	87.321.280	116.677.729	144.540.602
25	Kota Tasikmalaya	60.822.124	76.503.523	104.773.656	110.369.866	153.027.660
26	Kota Banjar	23.636.367	28.011.890	37.363.752	45.952.392	54.684.691
Total		2.631.257.214	3.038.251.754	3.640.589.815	5.868.899.654	7.909.533.625
Rata-rata		101.202.201	116.855.837	140.022.685	225.726.910	304.212.832
Nilai Tertinggi		314.627.155	360.152.627	441.871.142	834.505.865	1.068.548.454
Nilai Terendah		23.636.367	28.011.890	37.363.752	45.952.392	54.684.691

Tri Purnamasari Halim, 2016

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modalserta Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.1 tersebut menggambarkan bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2008-2012. Dapat dilihat bahwa PAD masing-masing daerah hampir selalu mengalami peningkatan. Nilai Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2008 mencapai Rp 2.631.257.214.000,00 dengan nilai rata-rata yaitu Rp 101.202.201.000,00. PAD terbesar diperoleh oleh Kota Bandung dengan nilai Rp 314.627.155.000,00. Hal ini membuktikan bahwa potensi daerah yang ada di Kota Bandung telah memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan. Pajak Daerah menjadi kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Bandung pada tahun 2008 tersebut. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis pajak yang masuk ke dalam kas Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Kota Bandung juga merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata kuliner di Indonesia sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung setiap tahun selalu terjadi peningkatan. PAD terendah adalah Kota Banjar yaitu Rp 23.636.367.000, hal ini disebabkan karena Kota Banjar merupakan daerah yang tidak terlalu padat penduduknya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tahun 2014, jumlah penduduk Kota Banjar tercatat sekitar 190.845 jiwa. Selama sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk Kota Banjar hanya sekitar 1,14 persen per tahun (Sumber: Kota Banjar Dalam Angka 2015). Sehingga ini dapat menjadi salah satu faktor Pendapatan Asli Daerah untuk Kota Banjar lebih rendah dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Pada tahun 2009, total nilai PAD menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 3.038.251.754.000,00; mengalami peningkatan sebesar Rp 406.994.540.000,00 dari tahun 2008. Rata-rata PAD yang dicapai pada tahun 2009 tersebut adalah Rp 116.855.837.000,00. Sama dengan tahun sebelumnya, PAD terbesar juga dicapai oleh Kota Bandung dengan nilai Rp 360.152.627.000,00; mengalami peningkatan sebesar Rp 45.525.472.000,00 dari

Tri Purnamasari Halim, 2016

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modalserta Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahun sebelumnya. PAD terendah juga masih diperoleh oleh Kota Banjar yaitu senilai Rp 28.011.890.000,00; meningkat Rp 4.375.523.000,00 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010, total nilai PAD untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai Rp 3.640.589.815.000,00; mengalami peningkatan sebesar Rp 602.338.061.000,00; dengan rata-rata senilai Rp 140.022.685.000,00. PAD terbesar masih diperoleh oleh Kota Bandung yaitu Rp 441.871.142.000,00; dan yang terendah adalah Kota Banjar dengan Rp 37.363.752.000,00.

Pada tahun 2011, total PAD menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai Rp 5.868.899.654.000,00; dengan nilai rata-rata yaitu Rp 225.726.910.000,00. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2011 dimana Kota Bandung memiliki PAD terbesar yaitu sebesar Rp 834.505.865.000,00 dan Kota Banjar memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Rp 45.952.392.000,00 diantara Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pada tahun 2012, total nilai PAD Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai Rp 7.909.533.625.000,00; dengan PAD rata-rata sebesar Rp 304.212.832.000,00. Berbeda dengan tahun sebelumnya, PAD terbesar diperoleh oleh Kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp 1.068.548.454.000,00; mengalami peningkatan sebesar Rp 383.427.055.000,00 dari tahun sebelumnya. Penerimaan yang berkontribusi besar pada PAD Kabupaten Bogor adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki kontribusi 70% terhadap PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2012 tersebut. Hal ini dipicu salah satunya karena jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang cukup besar, menurut Badan Pusat Statistik penduduk Kabupaten Bogor mencapai sekitar 5.331.149.00 jiwa. PAD terendah masih diperoleh oleh Kota Banjar yaitu sebesar Rp 54.684.691.000,00. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjar yang masih rendah. Namun PAD Kota Banjar selalu meningkat tiap tahunnya.

4.1.2.2 Gambaran Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun Dana Alokasi Khusus tidak termasuk dalam Dana Perimbangan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Fungsi Dana Perimbangan selain sebagai bantuan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, juga sebagai penyeimbang kondisi fiskal masing-masing daerah. Data realisasi Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun periode penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Dana Perimbangan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat
tahun 2008-2012 (Ribu Rupiah)

No	Nama Instansi Pemerintahan	NILAI REALISASI DANA PERIMBANGAN (Tanpa Dana Alokasi Khusus)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kabupaten Bogor	1.325.744.391	1.462.822.995	1.468.912.464	1.621.452.319	1.890.559.991
2	Kabupaten Sukabumi	908.576.262	1.037.432.841	1.013.805.376	1.134.326.426	1.353.630.391
3	Kabupaten Cianjur	908.818.910	939.977.285	984.159.468	1.071.662.977	1.281.591.651
4	Kabupaten Bandung	1.121.876.252	1.413.494.619	1.317.126.333	1.411.315.520	1.786.589.500
5	Kabupaten Garut	1.080.269.778	1.142.152.194	1.163.638.312	1.282.027.511	1.568.418.201
6	Kabupaten Tasikmalaya	845.351.608	870.634.972	1.037.644.063	967.115.870	1.175.126.942
7	Kabupaten Ciamis	916.599.032	925.976.884	943.456.101	1.032.762.427	1.263.734.539
8	Kabupaten Kuningan	638.187.180	728.214.055	725.686.234	793.318.422	970.246.944
9	Kabupaten Cirebon	865.855.726	942.439.640	964.808.702	1.022.787.637	1.241.524.148
10	Kabupaten Majalengka	680.514.518	734.600.767	815.205.610	913.296.621	1.145.700.452
11	Kabupaten Sumedang	660.069.176	695.749.231	706.097.923	814.195.273	1.162.092.858
12	Kabupaten Indramayu	853.254.118	878.547.889	985.112.558	1.034.234.531	1.243.811.196
13	Kabupaten Subang	753.117.389	827.331.681	906.233.500	950.713.105	1.126.649.035
14	Kabupaten Purwakarta	465.721.381	545.714.199	600.670.506	613.947.872	748.458.492

No	Nama Instansi Pemerintahan	NILAI REALISASI DANA PERIMBANGAN (Tanpa Dana Alokasi Khusus)				
		2008	2009	2010	2011	2012
15	Kabupaten Karawang	914.585.916	972.964.475	1.023.897.008	1.120.138.415	1.337.035.300
16	Kabupaten Bekasi	969.633.332	1.049.354.053	1.063.307.199	1.101.673.249	1.407.674.031
17	Kabupaten Bandung Barat	486.211.545	657.902.859	683.079.829	747.057.553	905.334.277
18	Kota Bogor	506.150.567	569.556.802	574.781.228	593.691.705	717.029.188
19	Kota Sukabumi	313.858.452	337.776.432	362.997.747	387.582.514	466.989.259
20	Kota Bandung	1.352.294.068	1.403.253.720	1.407.729.295	1.361.084.670	1.770.027.726
21	Kota Cirebon	401.306.492	440.583.926	466.691.799	523.155.527	632.838.043
22	Kota Bekasi	792.502.544	839.274.677	905.043.597	920.906.932	1.191.963.178
23	Kota Depok	585.490.241	636.493.262	668.237.931	664.789.057	763.858.138
24	Kota Cimahi	357.662.767	408.056.165	405.282.535	420.196.727	514.267.294
25	Kota Tasikmalaya	455.273.977	495.936.539	487.905.397	538.920.242	652.721.341
26	Kota Banjar	225.501.018	255.352.900	261.709.811	287.604.477	346.257.403
	Total	19.384.426.640	21.211.595.062	21.943.220.526	23.329.957.581	28.664.129.518
	Rata-Rata	745.554.871	815.830.579	843.970.020	897.306.061	1.102.466.520
	Nilai Tertinggi	1.352.294.068	1.462.822.995	1.468.912.464	1.621.452.319	1.890.559.991
	Nilai Terendah	225.501.018	255.352.900	261.709.811	287.604.477	346.257.403

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Selama kurun waktu 5 tahun seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.2 diatas, Dana Perimbangan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dana Perimbangan memiliki peran penting dalam keuangan daerah untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pada tahun 2008, Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah Rp 19.384.426.640.000,00 dengan nilai rata-rata setiap Kabupaten/Kota mencapai Rp 745.554.871.000,00. Dana Perimbangan tertinggi diperoleh oleh Kota Bandung yaitu sebesar 1.352.294.068 Ribu Rupiah. Dana Perimbangan terendah diperoleh oleh Kota Banjar yaitu sebesar 225.501.018 Ribu Rupiah.

Pada tahun 2009, Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai total Rp 21.211.595.062.000,00 dengan nilai rata-rata adalah Rp 815.830.579.000,00. Dana Perimbangan terbesar di

peroleh oleh Kabupaten Bogor yaitu Rp 1.462.822.995.000,00. Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan kebutuhan fiskal masing-masing daerah. Besaran kebutuhan fiskal tiap daerah tersebut diproyeksikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) , Produk Domestik Bruto per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten memiliki kebutuhan fiskal yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya pada tahun 2009 sehingga Kabupaten Bogor mendapatkan proporsi Dana Perimbangan yang paling besar. Dana Perimbangan terendah diperoleh oleh Kota Banjar yaitu sebesar Rp 255.352.900.000,00. Hal ini disebabkan Kota Banjar memiliki kebutuhan fiskal, luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat.

Pada tahun 2010, Dana Perimbangan yang diproporsikan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah Rp 21.943.220.526.000,00 dengan Dana Perimbangan rata-rata sebesar Rp 843.970.020.000,00. Dana Perimbangan terbesar masih diperoleh oleh Kabupaten Bogor yaitu Rp 1.468.912.464.000,00 dan Dana Perimbangan terendah diperoleh oleh Kota Banjar sebesar Rp 261.709.811.000,00.

Pada tahun 2011, Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah Rp 23.329.957.581.000,00 dengan Dana Perimbangan rata-rata sebesar Rp 897.306.061.000,00. Dana Perimbangan terbesar diperoleh oleh Kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp 1.621.452.319.000,00 dan Dana Perimbangan terendah masih diperoleh oleh Kota Banjar yaitu sebesar Rp 287.604.477.000,00.

Pada tahun 2012, Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai total Rp 28.664.129.518.000,00 dengan Dana Perimbangan rata-rata sebesar Rp 1.102.466.520.000,00. Dana Perimbangan terbesar diperoleh oleh Kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp 1.890.559.991.000,00 dan Dana Perimbangan terendah diperoleh oleh Kota Banjar sebesar Rp 346.257.403.000,00. Meskipun demikian, Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada Kota Banjar setiap tahun selalu terjadi peningkatan.

4.1.2.2 Gambaran Belanja Modal

Belanja Modal dilakukan untuk menambah aset tetap agar memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Dikutip dari www.stabilitas.co.id, realisasi Belanja Modal pemerintah selalu menunjukkan persentase yang kurang baik. Sejak tahun 2008 pertumbuhannya tidak pernah melampaui 15 persen, disaat penyerapan anggaran juga tidak pernah menyentuh 100 persen. Hal itu jauh berbeda dibanding belanja barang yang kenaikan rata-rata dalam periode yang sama mencapai 25 persen.

Nilai realisasi Belanja Modal untuk tahun periode penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Modal menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2008-2012 (Ribu Rupiah)

No	Nama Instansi Pemerintahan	NILAI REALISASI BELANJA MODAL				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kabupaten Bogor	366.061.050	510.324.977	612.386.351	703.670.730	1.035.467.434
2	Kabupaten Sukabumi	573.593.144	148.648.941	258.510.712	202.654.073	268.721.244
3	Kabupaten Cianjur	222.134.162	162.007.786	224.832.749	222.509.754	322.640.717
4	Kabupaten Bandung	180.480.211	148.925.370	198.090.778	172.470.536	489.588.414
5	Kabupaten Garut	249.644.672	75.464.674	155.205.401	180.601.217	312.790.042
6	Kabupaten Tasikmalaya	211.679.120	165.098.145	346.469.211	167.143.625	354.485.349
7	Kabupaten Ciamis	312.878.630	81.881.618	120.103.190	174.115.402	326.659.190
8	Kabupaten Kuningan	74.212.706	46.070.279	127.190.564	188.899.759	256.958.025
9	Kabupaten Cirebon	140.036.229	141.989.093	140.387.573	194.434.761	338.952.749
10	Kabupaten Majalengka	149.482.406	120.561.898	171.765.221	195.921.117	351.001.582
11	Kabupaten Sumedang	98.371.710	96.777.124	102.602.892	154.987.044	199.470.489
12	Kabupaten Indramayu	216.435.790	174.769.060	123.497.618	229.034.821	357.178.062
13	Kabupaten Subang	198.796.146	168.592.433	148.249.419	184.706.770	230.142.268
14	Kabupaten Purwakarta	72.290.179	103.648.704	126.161.699	144.490.975	166.565.693
15	Kabupaten Karawang	171.099.724	198.265.162	215.659.022	197.927.903	645.768.233

No	Nama Instansi Pemerintahan	NILAI REALISASI BELANJA MODAL				
		2008	2009	2010	2011	2012
16	Kabupaten Bekasi	148.105.756	664.800.165	391.290.243	643.501.281	970.051.419
17	Kabupaten Bandung Barat	77.878.823	99.685.853	157.014.840	149.207.385	351.375.690
18	Kota Bogor	91.191.371	108.449.609	165.939.884	132.952.958	330.396.448
19	Kota Sukabumi	71.789.087	120.425.783	40.400.090	50.859.240	21.920.947
20	Kota Bandung	345.160.822	390.988.308	405.699.484	612.082.191	806.665.039
21	Kota Cirebon	94.674.902	92.022.318	140.365.711	140.011.151	93.919.251
22	Kota Bekasi	304.885.167	342.503.050	274.296.336	323.903.766	737.186.198
23	Kota Depok	233.911.308	239.253.505	219.717.982	295.461.326	330.346.075
24	Kota Cimahi	101.204.225	95.247.306	91.135.651	102.870.919	111.845.035
25	Kota Tasikmalaya	106.028.695	118.847.625	124.138.672	104.450.591	126.531.362
26	Kota Banjar	100.903.670	104.072.768	62.263.981	151.418.341	148.623.923
Total		4.912.929.705	4.719.321.554	5.143.375.274	6.020.287.636	9.685.250.878
Rata-rata		188.958.835	181.512.367	197.822.126	231.549.524	372.509.649
Nilai Tertinggi		573.593.144	664.800.165	612.386.351	703.670.730	1.035.467.434
Nilai Terendah		71.789.087	46.070.279	40.400.090	50.859.240	21.920.947

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Dari tabel 4.3 di atas terlihat nilai Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2008 mencapai jumlah Rp 4.912.929.705.000,00 dengan nilai rata-rata Rp 188.958.835.000,00. Belanja Modal terbesar diperoleh dari Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar Rp 573.593.144.000,00. Belanja Modal terendah diperoleh dari Kota Sukabumi yaitu sebesar Rp 71.789.087.000,00.

Tahun 2009 nilai Belanja Modal totalnya adalah Rp 4.719.321.554.000,00 dengan rata-rata Rp 181.512.367.000,00. Nilai terbesar diperoleh dari Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp 664.800.165.000,00 dan nilai terendah diperoleh dari Kabupaten Kuningan yaitu sebesar Rp 46.070.279.000,00.

Pada tahun 2010 nilai Belanja Modal seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki total sebesar Rp 5.143.375.274.000,00 dengan nilai rata-ratanya yaitu sebesar Rp 197.822.126.000,00. Kabupaten Bogor menjadi daerah yang melaksanakan Belanja Modal terbesar di Jawa Barat pada tahun 2010 yaitu mencapai nilai Rp 612.386.351.000,00. Dan Kota Sukabumi adalah daerah yang

melaksanakan Belanja Modal terendah pada tahun 2010 tersebut yaitu sebesar Rp 40.400.090.000,00.

Pada tahun 2011 total nilai Belanja Modal yang dicapai adalah Rp 6.020.287.636.000,00 dengan nilai rata-rata Rp 231.549.524.000,00. Daerah yang memiliki Belanja Modal terbesar pada tahun 2011 adalah Kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp 703.670.730.000,00. Daerah yang melaksanakan Belanja Modal terendah adalah Kota Sukabumi yaitu sebesar Rp 50.859.240.000,00.

Untuk tahun 2012 nilai Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai total sebesar Rp 9.685.250.878.000,00 dengan nilai rata-rata mencapai Rp 372.509.649.000,00. Sama dengan tahun sebelumnya, daerah yang melaksanakan Belanja Modal terbesar adalah Kabupaten Bogor yaitu sebesar 1.035.467.434.000,00 dan yang terendah adalah Kota Sukabumi yaitu sebesar 21.920.947.000,00.

Berdasarkan data realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan rata-rata nilai realisasi Belanja Modal tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor semakin memperhatikan alokasi Belanja Modalnya dalam upaya pembangunan daerah dengan merealisasikan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan keperluan belanja pembangunan daerah. Sedangkan Kota Sukabumi menjadi daerah dengan nilai rata-rata realisasi belanja modal terendah selama periode 2008-2012. Realisasi Belanja Modal yang rendah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu belanja-belanja yang tidak produktif yang memdominasi APBD sehingga nilai belanja modal rendah.

4.1.2.4 Gambaran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dinilai berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. PDRB atas dasar harga konstan ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB

atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini diperoleh berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dimana pertumbuhan PDRB diperoleh dari pengurangan nilai PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Berikut data Pertumbuhan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (2000) untuk tahun periode penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Nilai Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2000) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Ribu Rupiah)

No	Nama Instansi Pemerintahan	PERTUMBUHAN PDRB				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Bogor	1.230.000.000	1.574.000.000	1.939.000.000	2.066.000.000	2.207.000.000
2	Kabupaten Sukabumi	293.000.000	334.000.000	351.000.000	390.000.000	441.000.000
3	Kabupaten Cianjur	300.000.000	360.000.000	394.000.000	441.000.000	426.000.000
4	Kabupaten Bandung	854.000.000	1.207.000.000	1.291.000.000	1.417.000.000	1.456.000.000
5	Kabupaten Garut	558.000.000	565.000.000	610.000.000	541.000.000	591.000.000
6	Kabupaten Tasikmalaya	210.000.000	226.000.000	238.000.000	240.000.000	268.000.000
7	Kabupaten Ciamis	331.000.000	359.000.000	379.000.000	(1.865.000.000)	302.000.000
8	Kabupaten Kuningan	159.000.000	188.000.000	215.000.000	198.000.000	212.000.000
9	Kabupaten Cirebon	374.000.000	384.000.000	409.000.000	411.000.000	432.000.000
10	Kabupaten Majalengka	191.000.000	195.000.000	207.000.000	220.000.000	237.000.000
11	Kabupaten Sumedang	245.000.000	227.000.000	270.000.000	276.000.000	283.000.000
12	Kabupaten Indramayu	254.000.000	556.000.000	703.000.000	756.000.000	527.000.000
13	Kabupaten Subang	313.000.000	306.000.000	328.000.000	348.000.000	250.000.000
14	Kabupaten Purwakarta	344.000.000	395.000.000	463.000.000	487.000.000	605.000.000
15	Kabupaten Karawang	1.358.000.000	2.341.000.000	1.979.000.000	1.307.000.000	2.007.000.000
16	Kabupaten Bekasi	2.488.000.000	3.199.000.000	3.417.000.000	3.616.000.000	3.789.000.000
17	Kabupaten Bandung Barat	338.000.000	417.000.000	463.000.000	513.000.000	536.000.000
18	Kota Bogor	256.000.000	276.000.000	296.000.000	313.000.000	316.000.000
19	Kota Sukabumi	119.000.000	111.000.000	121.000.000	108.000.000	105.000.000

20	Kota Bandung	2.265.000.000	2.469.000.000	2.767.000.000	3.094.000.000	3.332.000.000
21	Kota Cirebon	243.000.000	193.000.000	311.000.000	309.000.000	281.000.000
22	Kota Bekasi	581.000.000	853.000.000	1.096.000.000	1.134.000.000	1.206.000.000
23	Kota Depok	359.000.000	389.000.000	430.000.000	497.000.000	515.000.000
24	Kota Cimahi	273.000.000	328.000.000	362.000.000	360.000.000	375.000.000
25	Kota Tasikmalaya	199.000.000	210.000.000	225.000.000	242.000.000	257.000.000
26	Kota Banjar	35.000.000	38.000.000	40.000.000	41.000.000	45.000.000
Total		14.170.000.000	17.700.000.000	19.304.000.000	17.460.000.000	21.001.000.000
Rata-rata		545.000.000	680.769.231	742.461.538	671.538.462	807.730.769
Nilai tertinggi		2.488.000.000	3.199.000.000	3.417.000.000	3.616.000.000	3.789.000.000
Nilai terendah		35.000.000	38.000.000	40.000.000	(1.865.000.000)	45.000.000

Sumber : Data diolah

Pada tahun 2009, nilai Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah Rp 14.170.000.000.000,00 dengan nilai rata-ratanya adalah Rp 545.000.000.000,00. Pertumbuhan PDRB tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp 2.488.000.000.000,00 dan Pertumbuhan PDRB terendah adalah Kota Banjar yaitu berjumlah Rp 35.000.000.000,00.

Pada tahun 2010, nilai Pertumbuhan PDRB untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat meningkat dari tahun lalu yaitu sebesar Rp 17.700.000.000.000,00. Dengan nilai rata-ratanya adalah Rp 680.769.231.000,00. Nilai tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp 3.199.000.000.000,00 dan nilai terendah adalah Kota Banjar senilai Rp 38.000.000.000,00.

Pada tahun 2011, nilai pertumbuhan PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah Rp 19.304.000.000.000,00 dengan rata-rata mencapai nilai sebesar Rp 742.461.538.000,00. Sama dengan tahun sebelumnya, nilai pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 3.417.000.000,00 dan nilai terendah adalah Kota Banjar yaitu senilai Rp 40.000.000.000,00.

Pada tahun 2012, nilai pertumbuhan PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah Rp 17.460.000.000.000,00 dengan nilai rata-rata yaitu mencapai nilai Rp 671.538.462.000,00. Nilai pertumbuhan PDRB tertinggi diperoleh dari Kabupaten Bekasi sebesar Rp 3.616.000.000.000,00 dan sementara Kabupaten Ciamis mengalami penurunan nilai PDRB dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.865.000.000.000,00.

Pada tahun 2013, nilai pertumbuhan PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah Rp 21.001.000.000.000,00 dengan nilai rata-ratanya yaitu sebesar Rp 807.730.769.000,00. Dengan nilai tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi sebesar Rp 3.789.000.000.000,00 dan nilai terendah yaitu Kota Banjar sebesar Rp 45.000.000.000,00.

Berdasarkan data Pertumbuhan PDRB tersebut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat bahwa Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan nilai PDRB terbesar dibanding daerah lain. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Bekasi berbatasan dengan ibukota negara sehingga terdapat aktivitas perekonomian yang tinggi, contohnya aktivitas ekonomi dari sektor industri. Sektor industri adalah sektor yang paling dominan dalam menentukan PDRB. Sektor industri yg mendominasi di Kabupaten Bekasi contohnya adalah industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, perdagangan, industri logam, mesin dan elektronika, konstruksi, listrik, gas dan air. Sedangkan Kota Banjar menjadi daerah dengan PDRB rendah disebabkan faktor geografis Kota Banjar yang memiliki wilayah serta sumber daya manusia yang rendah dibanding dengan daerah lain serta berada jauh dari kota besar dan juga jauh dari pusat-pusat industri daerah sehingga aktivitas perekonomian di daerah tersebut lemah.

4.1.3 Analisis Statistik

4.1.3.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan lainnya. Hasil Pengujian statistika deskriptif untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Belanja Modal (BM) untuk tahun 2008-2012 dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5
Deskripsi Data Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
PAD	130	23636367	1068548454	23088532062	177604092,78	190802346,198	36405535314738464,000
BM	130	21920947	1035467434	30481165047	234470500,36	182843736,359	33431831925685184,000
PE	130	-1865000000	3789000000	89635000000	689500000,00	862796078,829	744417073643410560,000
DP	130	225501018	1890559991	114533329325	881025610,19	355085146,988	126085461611309744,000
Valid N (listwise)	130						

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan yaitu (dalam Ribu Rupiah) :

- 1) Nilai terendah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Rp 23.636.367,00 yang merupakan PAD dari Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2008, dan PAD yang tertinggi adalah Rp 1.068.548.454,00 yang diperoleh dari PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2012.
- 2) Nilai terendah dari Dana Perimbangan yaitu Rp 225.501.018,00 yang merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2008, dan Dana Perimbangan yang tertinggi adalah Rp 1.890.559.991 ,00 yang diperoleh dari PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2012.
- 3) Nilai terendah dari Belanja Modal (BM) yaitu Rp 21.920.947,00 yang merupakan Belanja Modal dari Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2012, dan Belanja Modal yang tertinggi adalah Rp 1.035.467.434,00 yang diperoleh dari Belanja Modal Kabupaten Bogor pada tahun 2012.
- 4) Nilai terendah dari Pertumbuhan Ekonomi (PE) yaitu Kabupaten Ciamis yang mengalami penurunan sebesar - Rp 1.865.000.000, pada tahun 2012, dan Pertumbuhan Ekonomi yang tertinggi adalah Rp 3.789.000.000,00 yang diperoleh dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi pada tahun 2013.

- 5) Rata-Rata dari PAD adalah Rp 177.604.092,78 ; Rata-rata dari Dana Perimbangan adalah Rp 881.025.610,19; Rata-rata dari Belanja Modal adalah Rp 234.470.500,36 ; dan rata-rata dari Pertumbuhan Ekonomi adalah Rp 689.500.000,00.

4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Asumsi klasik pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji normalitas data melalui analisis statistik dengan menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Kriteria pengujian adalah :

H_0 : Data residual berdistribusi normal.

H_1 : Data residual tidak berdistribusi normal.

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima dan sebaran data berdistribusi normal, sedangkan H_0 ditolak jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berikut adalah hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *software* SPSS 23.0 yang menjelaskan pengaruh PAD dan DP terhadap Belanja Modal.

Tabel 4.6
Uji Normalitas- Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Standardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,99221778
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,077
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Besarnya nilai dari *Kolmogorov-Smirnov Test* diatas adalah 0,104 atau lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka data mengenai Belanja Modal berdistribusi normal. Selanjutnya uji normalitas

dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen, hasil yang didapatkan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Uji Normalitas-Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (2)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Standardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,99611649
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,215
	Negative	-,121
Test Statistic		,215
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Besarnya nilai dari *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah 0,215. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data mengenai Pertumbuhan Ekonomi berdistribusi normal.

2) Uji Linieritas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear atau tidak antar variabel penelitian. Pengujian linearitas dilakukan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dapat dikatakan linear bila signifikansi (*Linearity*) kurang dari 0,05. Uji linearitas ini menggunakan SPSS 23.0 IBM *for windows*.

- a. Hasil uji linieritas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Hasil Uji Linieritas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variabel: BM

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,720	328,929	1	128	,000	90067574,515	,813

The independent variabel is PAD.

Dari Hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa dua variabel tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki hubungan yang linier karena memiliki nilai signifikansi (*linierity*) kurang dari 0,05.

- b. Hasil uji linieritas dengan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Linieritas Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variabel: BM

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,487	121,647	1	128	,000	-82211531,239	,359

The independent variabel is DP.

Dari Hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa dua variabel tersebut yaitu Dana Perimbangan dan Belanja Modal memiliki hubungan yang linier karena memiliki nilai signifikansi (*linierity*) kurang dari 0,05.

- c. Hasil uji linieritas Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.10
Hasil Uji Linieritas Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variabel: PE

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,495	125,540	1	128	,000	-89046411,341	3,320

The independent variabel is BM.

Tri Purnamasari Halim, 2016

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modalserta Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari Hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa dua variabel tersebut yaitu Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan yang linier karena memiliki nilai signifikansi (*linierity*) kurang dari 0,05.

3) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji ini hanya dapat dilakukan pada pengujian regresi multipel karena memiliki variabel independen lebih dari satu. Uji ini dilakukan pada variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan.

Besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir yaitu nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation factor* (VIF) < 10 . Hasil dari uji multikolonieritas yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonieritas dengan *Variance Inflation Factors* (VIF)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-9555369,336	21569650,529		-,443	,659		
PAD	,646	,052	,674	12,526	,000	,624	1,602
DP	,147	,028	,285	5,302	,000	,624	1,602

a. Dependent Variabel: BM

Dalam tabel tersebut dapat dilihat nilai toleransi nya adalah 0,624; dan nilai VIFnya adalah 1,602. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut terbebas dari asumsi multikolinearitas karena nilai VIF tersebut lebih besar dari 1,0 dan nilai toleransinya lebih kecil dari 1,0.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk uji regresi menghendaki adanya homokedastisitas yaitu kesamaan varians.

- a. Uji Heterokedastisitas variabel PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal

Tabel 4.12
Hasil Uji Heterokedastisitas – Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24276153,741	14430391,484		1,682	,095
	PAD	,057	,034	,177	1,666	,098
	DP	,031	,019	,178	1,673	,097

a. Dependent Variabel: ABSRES

Berdasarkan hasil tersebut kita ketahui nilai signifikansi dari PAD adalah 0,098 dan nilai signifikansi dari Dana Perimbangan adalah 0,098 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa pada variabel PAD dan DP tidak terjadi heterokedastisitas.

- b. Uji Heterokedastisitas variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.13
Hasil Uji Heterokedastisitas – Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	121669960,191	61335052,081		1,984	,049
	BM	1,129	,207	,435	5,468	,000

a. Dependent Variabel: RES2

Dari tabel tersebut terlihat bahwa telah terjadi heterokedastisitas pada variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai sig. 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga model regresi tidak layak pakai. Tindakan perbaikan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan cara transformasi seluruh variabel penelitian ke dalam fungsi logaritma natural (Ln), kemudian data diuji ulang. Hasil pengujian ulang data adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji *Geljser* setelah dilakukan transformasi variabel

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,755	1,177		-,642	,522
	Ln_BM	,069	,062	,098	1,113	,268

a. Dependent Variabel: AbsRes

Terlihat nilai signifikansi dari Belanja Modal adalah 0,268; yang artinya lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa pada variabel Belanja Modal tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

4.1.4.1 Analisis Regresi Linier Multipel

Analisis Regresi Linier Multipel dilakukan untuk menguji pengaruh lebih dari dua variabel melalui koefisien regresinya. Pada uji analisis Regresi Linier Multipel ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja modal. Persamaannya adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

b_1, b_2 = Koefisien regresi

a = Konstanta

e = Tingkat kesalahan pengganggu

Berdasarkan olah data dengan program *SPSS IBM 23.00* maka didapat hasil :

Tabel 4.15
Uji Regresi Linier Multipel

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Coefficients			Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-9555369,336	21569650,529		-,443	,659			
PAD	,646	,052	,674	12,526	,000	,624	1,602	
DP	,147	,028	,285	5,302	,000	,624	1,602	

a. Dependent Variabel: BM

Dengan demikian persamaan model penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil tersebut adalah :

$$\text{Belanja Modal} = -9555369,336 + 0,646 \text{ PAD} + 0,147 \text{ DP}$$

Dari hasil persamaan regresi linier multipel tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Dengan konstanta sebesar -9555369,336 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak ada perubahan, maka Belanja Modal akan bernilai sebesar Rp 9.555.369,34.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,646, artinya jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp 1,00 ; sementara Dana Perimbangan konstan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,646 kali.
- Dana Perimbangan (DP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,147, artinya Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp 1,00 ; sementara Pendapatan

Asli Daerah konstan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,147 kali.

4.1.4.1.1 Uji Keberartian Persamaan Regresi Linier Multipel (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut model regresinya berarti (layak) atau tidak untuk dianalisis. Uji ini menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti *One Way Anova* dengan tarif nyata (α) atau tingkat signifikansi = 5% (0,05).

Hipotesis pengujiannya adalah

H_0 : Persamaan regresi yang diestimasi berarti

H_1 : Persamaan regresi yang diestimasi tidak berarti

Kriteria pengujiannya adalah

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $F_{hitung} \leq 0,05$

H_1 diterima apabila nilai signifikansi $F_{hitung} > 0,05$

Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Hasil Uji F Regresi Linier Multipel

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3323548207049	2	1661774103524	213,359	,000 ^b
		963000,000		981500,000		
	Residual	9891581113634	127	7788646546168		
		27710,000		722,000		
	Total	4312706318413	129			
		390800,000				

a. Dependent Variabel: BM

b. Predictors: (Constant), DP, PAD

Tri Purnamasari Halim, 2016

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modalserta Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi F_{hitung} untuk uji keberartian regresi adalah 0,000 maka lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

4.1.4.1.2 Uji Koefisien Regresi Linier Multipel (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17
Uji koefisien Regresi Linier Multipel

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Coefficients			Tolerance	VIF
			Beta				
1 (Constant)	-9555369,336	21569650,529		-,443	,659		
PAD	,646	,052	,674	12,526	,000	,624	1,602
DP	,147	,028	,285	5,302	,000	,624	1,602

a. Dependent Variabel: BM

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pengujian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh antar variabel apakah terdapat pengaruh positif atau tidak, antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal dapat dilihat Hipotesis pengujiannya sebagai berikut.

$H_0 : \beta_1 = 0$, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

$H_1 : \beta_1 > 0$, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Kriteria pengujiannya adalah

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $t_{hitung} > 0,05$

H_1 diterima apabila nilai signifikansi $t_{hitung} < 0,05$.

Dari tabel 4.17 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi t_{hitung} untuk Pendapatan Asli Daerah adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,05. Maka Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada alpha 5% (0,05) dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada taraf keyakinan 95%.

Koefisien regresi PAD sebesar 0,646 bernilai positif artinya PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, artinya pada saat PAD naik maka Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat PAD turun maka Belanja Modal juga akan turun. Maka kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,00 akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,646 kali dan sebaliknya, penurunan PAD sebesar Rp 1,00 akan menurunkan Belanja Modal sebesar 0,646 kali. Maka berdasarkan uji t tersebut dapat disimpulkan hipotesis H_1 diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Pengujian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh antar variabel apakah terdapat pengaruh positif atau tidak antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

Hipotesis penelitiannya adalah

H_0 : $\beta_2 = 0$, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_1 : $\beta_2 > 0$, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Kriteria pengujiannya sebagai berikut :

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $t_{hitung} \leq 0,05$

H_1 diterima apabila nilai signifikansi $t_{hitung} > 0,05$

Dari tabel 4.17 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi t_{hitung} dari Uji t untuk Dana Perimbangan adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari tingkat

kesalahan (α) 0,05; artinya Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada taraf keyakinan 95%.

Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar 0,147 bernilai positif memiliki arti yang sama dengan koefisien regresi PAD. Bila Dana Perimbangan meningkat maka jumlah Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat Dana Perimbangan menurun maka Belanja Modal juga menurun. Kenaikan Belanja Modal sebesar Rp 1,00 akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,147 kali dan sebaliknya, penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp 1,00 akan menurunkan Belanja Modal sebesar 0,147 kali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4.1.4.2 Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana pada penelitian ini yaitu dilakukan untuk menguji rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh Belanja Bodal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya atau seberapa besar pengaruh antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

Persamaan regresi linear sederhana yaitu:

$$Z = a + bY$$

Keterangan:

- a = bilangan konstanta ,
- b = koefisien regresi,
- Y = Belanja Modal
- Z = Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari Uji Regresi Linier Sederhana adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-89046411,340	87986948,306		-1,012	,313
BM	3,320	,296	,704	11,204	,000

a. Dependent Variabel: PE

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa konstanta adalah sebesar 89046411,340 dan nilai B adalah sebesar 3,320, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 89046411,340 + 3,320\text{BM}$$

Artinya adalah (dalam Ribu Rp):

- a. Dengan Konstanta sebesar 89046411,340 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai Belanja Modal, maka nilai Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar Rp 89.046.411,34.
- b. Koefisien Regresi sebesar 3,320 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1,00 Belanja Modal, maka nilai Pertumbuhan Ekonomi bertambah sebesar 3,320 kali.

4.1.4.2.1 Uji Keberartian Persamaan Regresi Linier Sederhana (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut model regresinya layak atau tidak. Uji ini menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti *One Way Anova* dengan tarif nyata (α) atau nilai signifikansi adalah 5% (0,05).

Hipotesis Pengujiannya adalah

H_0 : Model regresi yang diestimasi dikatakan layak

H_1 : Model regresi yang diestimasi tidak layak

Kriteria Pengujiannya adalah

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $F_{hitung} \leq 0,05$

H_1 diterima apabila nilai signifikansi $F_{hitung} > 0,05$

Tabel 4.19
Hasil Uji F Regresi Linier Sederhana

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4754911947797 0270000,000	1	4754911947797 0270000,000	125,540	,000 ^b
	Residual	4848068302202 9730000,000		128		
	Total	9602980250000 0000000,000	129			

a. Dependent Variabel: PE

b. Predictors: (Constant), BM

Dari Hasil Uji F diatas memperlihatkan nilai signifikansi adalah 0,000. Dapat diambil kesimpulan H_0 diterima, bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4.1.4.2.2 Uji Koefisien Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.20
Uji Koefisien Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-89046411,340	87986948,306		-1,012	,313
	BM	3,320	,296	,704	11,204	,000

a. Dependent Variabel: PE

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_3 = 0$: Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$H_1 : \beta_3 > 0$: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kriteria pengujiannya sebagai berikut.

H_0 diterima apabila nilai signifikansi $t_{hitung} \leq 0,05$

H_1 diterima apabila nilai signifikansi $t_{hitung} > 0,05$

Dari tabel 4.20 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi t_{hitung} dari Uji t untuk Belanja Modal adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05; artinya Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada taraf keyakinan 95%.

Koefisien regresi Belanja Modal sebesar 3,320 bernilai positif memiliki arti bahwa jika Belanja Modal bertambah maka jumlah Pertumbuhan Ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat Belanja Modal menurun maka Pertumbuhan Ekonomi juga menurun. Kenaikan Belanja Modal sebesar Rp 1,00 akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,320 kali dan sebaliknya, penurunan Belanja Modal sebesar Rp 1,00 akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,320 kali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima, yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4.2 Pembahasan

Setelah melakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 23.0, selanjutnya dilakukan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I. Atas hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan diambil

beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang menjadi acuan dari tujuan penelitian ini.

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil Analisis Regresi Linier Multipel untuk menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dari nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008-2012 terlihat selalu terjadi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing kabupaten/kota. Demikian juga halnya terjadi pada realisasi Belanja Modal selalu terjadi peningkatan Belanja Modal pada hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber untuk pengeluaran daerah salah satunya yaitu Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah nilai Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat maka semakin bertambah pula nilai realisasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan Belanja Modal semaksimal mungkin. Namun apabila Pendapatan Asli Daerah rendah, pemerintah akan sulit melaksanakan Belanja Modal yang maksimal.

Hasil ini sesuai dengan studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah yang telah dilakukan sebelumnya, contohnya oleh Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; von Furstenberg et al, tahun 1986 yang menyatakan bahwa “Pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*” (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; von Furstenberg et al, 1986).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) bahwa “PAD berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali”. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyimpulkan bahwa “PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Sulawesi Utara, dimana Pendapatan daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah terus meningkat dan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah terhadap pos-pos penerimaan PAD dilakukan secara memadai. Sedangkan belanja modal menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan daerah, maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah.”

4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Selanjutnya hasil analisis regresi linier multipel untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Dari hasil uji analisis regresi linier multipel disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana Perimbangan dianggap sebagai penerimaan terbesar pada keuangan daerah di Kabupaten/kota di Jawa Barat.

Sumber penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah adalah dana transfer dari pemerintah pusat atau Dana Perimbangan. Sesuai dengan fungsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah masih bergantung dengan Dana Perimbangan dari pusat, karena pemerintah kab/kota di Jawa Barat ini memiliki kesenjangan fiskal yang cukup tinggi. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terlihat pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah serius dalam meningkatkan kinerjanya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dan juga peningkatan kesadaran publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan membayar pajak.

Hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Sebagian studi menyatakan bahwa “Pendapatan

mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan” (Aziz, 2000; Doi, 1998). Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan Simanjuntak (2009) yang menyatakan bahwa Transfer pemerintah pusat (DAU, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil SDA) memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap belanja modal. Namun hasil ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2013) yang menyatakan bahwa hanya Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam yang mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak, tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana yang telah dilakukan dengan menguji bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menghasilkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pelaksanaan Belanja Modal sangat penting dilaksanakan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah dan memenuhi pelayanan publik yang baik. Peningkatan Belanja Modal oleh pemerintah daerah merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Peningkatan Belanja Modal berupa belanja bangunan, irigasi, jalan, serta infrastruktur dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan Belanja Modal dapat memberikan manfaat langsung terhadap publik dibandingkan belanja rutin. Apabila kepercayaan publik meningkat, maka diharapkan perekonomian daerah tersebut juga meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yang menyimpulkan bahwa

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain faktor swasta, rumahtangga dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin besar nilai belanja

modal serta belanja barang dan jasa semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. (DJPk, 2011)

Sesuai dengan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001 dalam Abdullah dan Halim, 2006). Agar tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan belanja modal untuk penambahan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian.

Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail dan Hamzah (2006) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil penelitian yang dilakukan pada 26 provinsi di Indonesia tahun 1992-2002.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maolana (2012) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, hal ini disebabkan karena porsi Belanja Modal pemerintah daerah yang tidak terlalu besar, dan alokasi Belanja Modal untuk jalan irigasi dan jaringan hanya 46,69% dan sisanya digunakan untuk Belanja Modal yang terkait urusan pemerintah seperti peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan.